

BAB II

KAJIAN LITERATUR YANG RELEVAN

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengkaji beberapa hasil penelitian terdahulu dari peneliti lain untuk menambah pengetahuan serta menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu. Kajian terhadap penelitian terdahulu ini dimulai dengan membuat daftar karakteristik inklusi untuk tinjauan abstrak dan tinjauan teks lengkap. Informasi yang diperoleh dari tinjauan literatur ini dipergunakan penulis untuk menguatkan kerangka berpikir peneliti serta khasanah pengetahuan peneliti. Dalam kajian pustaka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Implementasi Google Forms Dalam Kegiatan Monitoring Perumahan Di Dinas Sosial Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan oleh Bismillah Dewi Pertiwi pada tahun 2021 dengan menggunakan metode kualitatif untuk memahami dampak penggunaan teknologi dalam kegiatan monitoring tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan formulir kertas memiliki risiko kehilangan data akibat kontak dengan air serta kerusakan jika data tidak segera diinputkan. Dengan beralih ke *Google Forms*, Dinas Sosial mendapatkan manfaat tambahan berupa kemampuan untuk mengunggah foto dan video sebagai bukti pelaksanaan program pelayanan makanan oleh petugas sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Implikasi dari penelitian ini memberikan pandangan yang lebih jelas terkait pentingnya adopsi teknologi dalam bidang sosial, seperti monitoring kegiatan pelayanan makanan. Dengan memanfaatkan Google Forms, risiko kehilangan dan kerusakan data dapat diminimalkan, dan bukti visual seperti foto dan video dapat secara efektif mendokumentasikan pelaksanaan program. Hal ini memberikan keuntungan bagi Dinas Sosial dalam melacak dan memverifikasi aktivitas petugas serta memperkuat akurasi pelaporan. Dengan begitu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas program pelayanan sosial di Kota Surabaya melalui penerapan teknologi informasi yang lebih modern.

2. Analisis Kinerja Kader Posyandu di Puskesmas Paniki Kota Manado Performance. Pada tahun 2015, Sriyatty W. Sengkey, dan kawan-kawan melaksanakan penelitian yang berfokus pada analisis kinerja kader Posyandu di Puskesmas Paniki Kota Manado. Metode yang digunakan dalam adalah metode kualitatif untuk memahami dan mengevaluasi kinerja kader Posyandu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kemampuan kader menunjukkan elemen kematangan yang terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh melalui pendidikan dan pelatihan. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal ini. Penelitian juga menyoroti bahwa penghargaan yang diberikan kepada kader, seperti pujian dan hadiah dalam berbagai bentuk, termasuk diumumkan kepada rekan kerja, sudah berjalan cukup baik, tetapi masih dianggap perlu peningkatan dalam sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi.

Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga terkait kinerja kader Posyandu, khususnya di lingkungan Puskesmas Paniki Kota Manado. Dengan menyoroti aspek kemampuan dan penghargaan, penelitian ini mendorong perhatian terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk kader Posyandu guna memastikan pengetahuan dan keterampilan yang optimal. Selain itu, peningkatan dalam pemberian penghargaan yang lebih sesuai dengan kontribusi kader dapat menjadi langkah yang signifikan untuk memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam program kesehatan masyarakat.

3. Insentif dan Kinerja Kader Posyandu. Penelitian yang dilakukan oleh Wirapuspita pada tahun 2013 ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara insentif yang diberikan kepada kader Posyandu dan kinerja yang mereka tunjukkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kinerja kader dan berbagai bentuk insentif yang diberikan kepada mereka, seperti bantuan operasional, piagam penghargaan, uang transport, dan pelatihan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sejumlah faktor insentif, seperti pemberian seragam, partisipasi dalam lomba, tunjangan kesehatan, bantuan sembako, Tunjangan Hari Raya (THR), kunjungan dari pihak kelurahan, kunjungan ketua RT, serta acara rekreasi, ternyata tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja kader Posyandu. Dalam konteks ini, penelitian memberikan pemahaman penting bahwa tidak semua jenis insentif memiliki pengaruh yang sama terhadap motivasi dan kinerja kader. Hal ini menunjukkan

perlunya pemilihan dan penyusunan insentif yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kader Posyandu untuk meningkatkan partisipasi dan kinerja mereka dalam program kesehatan masyarakat.

4. Pelatihan Literasi Digital Pada Perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati pada tahun 2019 fokus pada pelatihan literasi digital bagi perempuan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan pentingnya pemberian pelatihan literasi digital kepada perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ibu perlu meningkatkan pengetahuan mereka, terutama dalam bidang teknologi, agar mampu memberikan bimbingan yang tepat kepada anggota keluarga, terutama anak-anak, dalam penggunaan teknologi.

Peningkatan pemahaman tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ternyata membantu para ibu dalam melakukan penyaringan terhadap konten digital yang akan disajikan kepada anak-anak. Dengan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang teknologi, para ibu dapat memastikan bahwa konten yang diakses oleh anak-anak sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan dan aman bagi perkembangan mereka. Oleh karena itu, pelatihan literasi digital pada perempuan memiliki dampak positif tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keseluruhan keluarga dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang.

Berikut analisis lebih lanjut pada artikel penuh terhadap penelitian terdahulu penulis rangkuman dalam tabel 2.1 :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Sitasi Jurnal	Judul	Metode	Temuan Penelitian
1	Bismiilah Dewi Pertiwi, 2021	Implementasi <i>Google Forms</i> Dalam Kegiatan Monitoring Permakanan Di Dinas Sosial Kota Surabaya	Kualitatif	Form kertas yang digunakan bisa berakibat atau beresiko kehilangan data yang terdapat pada form tersebut apabila terkena air serta beresiko rusak bila mana data tersebut tidak diinputkan segera. Dengan menggunakan <i>Google Forms</i> , Dinas Sosial bisa mendapatkan benefit lebih terkait unggahan foto dan video yang menunjukkan bukti bahwa kegiatan dari program permakanan sudah dilaksanakan oleh petugas yang bersangkutan sesuai tupoksinya.
2	Sriyatty W. Sengkey, G. D. Kandou, J. M. Pangemanan, 2015	Analisis Kinerja Kader Posyandu di Puskesmas Paniki Kota Manado Performance	Kualitatif	Kemampuan kader yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan pula dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat di peroleh dari pendidikan, latihan dan pengetahuan cukup baik namun masih perlu ditingkatkan. Dijelaskan pula dalam penelitian ini bahwa penghargaan berupa keinginan dari kebutuhan egoistis, yang diwujudkan dalam pujian, hadiah (dalam bentuk uang ataupun tidak), diumumkan kepada rekan-rekan sekerjanya cukup baik namun masih dirasakan belum sesuai
3	Wirapuspita, 2013	Insentif dan Kinerja Kader Posyandu	Kuantitatif	Kinerja Kader berhubungan dengan pemberian bantuan operasional, piagam, uang transport dan pelatihan. Sedangkan pemberian seragam, keikutsertakan lomba, tunjangan kesehatan, sembako, THR, kunjungan

				kelurahan, kunjungan ketua RT, kunjungan pimpus dan rekreasi tidak berhubungan dengan kinerja kader.
4	Sulistiyowati et al., 2019	Pelatihan Literasi Digital Pada Perempuan	Kualitatif	Seorang ibu perlu mengupgrade pengetahuannya khususnya yang terkait dengan teknologi agar bisa membina anggota keluarga khususnya anak-anak dalam penggunaan teknologi. Peningkatan pemahaman TIK membantu para Ibu untuk menyaring konten digital yang akan diberikan pada anak.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti terhadap Penelitian yang Relevan

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat beberapa persamaan penelitian Monkar Penting 1.0 ini dengan penelitian yang terdahulu, yaitu :

1. Penggunaan metode penelitan yaitu metode penelitian kualitatif seperti pada penelitian 1,2, dan 4.
2. Pemanfaatan *Google Forms* dalam monitoring program yaitu pada penelitian 1.
3. Kebutuhan penyesuaian apresiasi kepada kader posyandu sebagai pelaksana program pada penelitian 3.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah terkait desain untuk monitoring terhadap kinerja kader posyandu secara online dengan komintmen dan motivasi. Penelitian ini menggabungkan literasi digital pada kader posyandu agar mendukung kinerja mereka di lapangan dalam menjalankan fungsi sebagai penyuluh. Penelitian ini juga menggabungkan penggunaan TIK dalam kegiatan monitoring dan juga sebagai pengumpul data mengenai kegiatan penyuluhan. Pemanfaatan TIK tidak terbatas sebagai alat monitoring saja, namun sebagai media pengumpul data yang akan menjadi dasar untuk program lainnya. Pemanfaatan TIK

tidak akan berjalan tanpa ada motivasi dan komitmen yang jelas dari pengguna yakni kader posyandu dan CL. Desain ini mengkolaborasikan elemen pentahelix untuk memberikan dukungan terhadap program pencegahan stunting dengan tujuan akhir sesuai dengan beberapa poin dari SDGs.

2.2. Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1. Tinjauan tentang *Stunting*

2.2.1.1. Pengertian *Stunting*

Stunting merupakan kondisi dimana balita dinyatakan memiliki panjang atau tinggi yang pendek dibanding dengan umur. Panjang atau tinggi badannya lebih kecil dari standar pertumbuhan anak dari WHO (Kemenkes, 2018). *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun (Cholih, Nasrullah, and Mundakir 2020). *Stunting* menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2SD/standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3SD (*severely stunted*) (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017).

Menteri Kesehatan mengeluarkan surat edaran dengan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang standar antropometri, pengertian pendek dan sangat pendek merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan standar ukur dengan istilah *stunting*. Balita *stunting* dapat diketahui bila balita

diukur panjang dan tinggi badan, dibandingkan dengan standar, dan hasilnya dibawah normal (Saravina 2017).

2.2.1.2. Penyebab *Stunting*

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Secara lebih detil, beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut (Kemenkes, 2018):

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik.
2. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas).
3. Masih kurangnya akses rumah tangga/ keluarga ke makanan bergizi.
4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi dampak.

Faktor yang menyebabkan *stunting* pada anak merupakan proses kumulatif yang terjadi saat kehamilan masa kanak-kanak dan sepanjang siklus kehidupan. *Stunting* terjadi karena faktor penyebab seperti genetik, riwayat berat lahir, riwayat penyakit infeksi, pendapatan orangtua, jenis kelamin, umur, status gizi, sangat mempengaruhi kejadian *stunting* (WHO, 2012).

2.2.1.3. Dampak *Stunting*

Stunting memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017), yaitu :

1. Dampak Jangka Pendek.

- 1) Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian
- 2) Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal
- 3) Peningkatan biaya kesehatan

2. Dampak Jangka Panjang

- 1) Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek dibandingkan pada umumnya)
- 2) Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya
- 3) Menurunnya kesehatan reproduksi
- 4) Kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah
- 5) Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal.

2.2.1.4. *Stunting* dan Lingkaran Kemiskinan

Stunting merupakan gambaran gangguan pada sosial ekonomi yang akan berakibat pada berat badan lahir rendah dan kekurangan gizi pada masa balita jadi mengakibatkan pertumbuhan yang tidak sempurna pada masa berikutnya. Sebuah penelitian di Filipina menyatakan riwayat *stunting* pada usia 2 tahun pertama kehidupan berkaitan dengan efek pada pencapaian sekolah hingga masa dewasa. Analisis data dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara pendapatan berdasarkan tinggi badan pekerja, dimana kenaikan 10 cm pada tinggi badan berhubungan dengan peningkatan pendapatan sebesar 7,5% pada laki-laki dan 13% pada wanita. Hal ini menegaskan pentingnya gizi anak sejak usia dini, mengingat *stunting* berkaitan erat dengan produktivitas di kemudian hari (Yadika, Berawi, and Nasution 2019).

Kemiskinan dianggap menjadi faktor penyebab terjadinya *stunting* pada balita. Rumah tangga yang miskin tidak dapat memenuhi asupan gizi untuk anaknya, sehingga anak tersebut menjadi *stunting*. Tumbuh kembang anak yang terhambat akan menghasilkan SDM yang tidak berkualitas. SDM yang tidak berkualitas tidak dapat bersaing untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga akan terjatuh dalam kemiskinan. Seperti itulah gambaran mengenai *stunting* dan pusaran kemiskinan.

Kementerian Kesehatan memberikan investasi melalui perbaikan gizi dengan tujuan memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 3 persen dalam satu tahun (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan). Peningkatan status gizi diharapkan dapat membentuk SDM yang berkualitas diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Dampak ini tentu saja dapat tercapai apabila semua pihak bekerja sama mengatasi masalah ini sesuai dengan bidangnya. Perbaikan gizi tidak hanya bertujuan untuk pengentasan kelaparan saja. Asupan gizi anak yang berkualitas dapat meningkatkan kecerdasan anak sehingga memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang baik, anak berkesempatan untuk bersaing di dunia kerja dengan mendapatkan upah atau gaji layak yang dapat memutus rantai kemiskinan.

2.2.2. Tinjauan tentang *Social Group* dan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)

Max Weber mengkategorisasikan kelompok sosial jadi dua jenis, yaitu kelompok formal (*formal group*) dan kelompok informal (*informal group*). Kelompok formal merujuk pada kelompok-kelompok sosial yang mempunyai

seperangkat peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan mereka. Contoh dari formal group adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis dan lain sebagainya (tirto.id). Pada kelompok informal, tidak terdapat struktur dan peraturan organisasi yang bersifat pasti. Kelompok informal umumnya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali atas dasar kepentingan dan pengalaman yang sama di antara para anggotanya. Lingkaran pertemanan atau komunitas geng remaja bisa menjadi contoh kelompok informal.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan berfokus pada kesehatan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat.

2.2.2.1. Sejarah, Pengertian dan Manfaat (POSYANDU)

Sejak tahun 1970 pada periode orde baru, Posyandu yang merupakan kepanjangan dari Pos Pelayanan Terpadu sangat berperan penting dalam program kesehatan Indonesia. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Fungsi Posyandu adalah untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar guna mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan perpanjangan tangan Puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Masyarakat internasional menghargai kesuksesan usaha pemerintah

Indonesia dalam memberikan pelayanan dasar melalui pemberdayaan masyarakat seperti Posyandu, sehingga tidak sedikit negara lain yang ikut mencontoh menerapkan program ini di negara mereka (Iswarawanti 2010).

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKMB) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (Kemenkes, 2011).

Posyandu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. Menurut buku Kemenkes (2011) manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendukung perbaikan perilaku, status gizi dan kesehatan dalam keluarga balita seperti wajibnya pemantauan tumbuh kembang pada balita.
2. Mendukung dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.
3. Mendukung pencegahan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan dan dapat dicegah dengan imunisasi.
4. Mendukung pelayanan Keluarga Berencana (KB)
5. Mendukung pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan pekarangan.

Survei nasional pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa selain Puskesmas, Posyandu merupakan sarana kesehatan yang penting bagi masyarakat. Sebanyak 45,5% pengasuh membawa anaknya ke Posyandu secara teratur (4 kali berturut-turut). Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan tempat yang paling banyak

dikunjungi untuk penimbangan balita yaitu sebesar 78,3%. Alasan utama pengasuh membawa anaknya ke Posyandu adalah untuk memantau kesehatan anak, mendapatkan imunisasi, pengobatan, pemberian suplemen gizi dan makanan tambahan bagi anak mereka.

Dari penjelasan sejarah di atas dapat disimpulkan bahwa POSYANDU merupakan salah satu garda terdepan bidang kesehatan di masyarakat yang sering dimanfaatkan oleh warga tingkat Desa yang mayoritas konsentrasi pelayanannya adalah untuk ibu hamil hingga balita. Kegiatan posyandu yang beragam ini tentunya membutuhkan penggerak yang biasa disebut sebagai kader posyandu. Penyelenggaraan Posyandu dilakukan oleh kader yang merupakan anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk melakukan kegiatan Posyandu.

2.2.2.2. Kader POSYANDU dan Tugasnya

Kader posyandu merupakan anggota yang berasal dari masyarakat di daerah tersebut serta bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu. Kader posyandu sebagai penyelenggara posyandu dituntut untuk memenuhi kriteria yaitu anggota masyarakat setempat, dapat membaca dan menulis huruf latin, memiliki minat dan bersedia menjadi kader, bekerja secara sukarela, dan memiliki kemampuan dan waktu luang (Kemenkes RI, 2011).

Keberhasilan pengelolaan posyandu memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik dukungan moral, material, maupun finansial. Selain itu diperlukan adanya kerjasama, tekanan dan pengabdian para pengelolanya termasuk kader posyandu. Tugas Kader Posyandu menurut Kemenkes RI (2011) adalah :

1. Persiapan Pelaksanaan Posyandu (H-1) Kader posyandu memiliki peran penting dalam hal persiapan sebelum kegiatan posyandu berlangsung, kegiatan tersebut seperti mempublikasikan hari buka posyandu melalui pertemuan warga setempat, mempersiapkan tempat dan sarana posyandu, melakukan pembagian tugas kader posyandu, melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya, mempersiapkan bahan PMT Penyuluhan.
2. Pelaksanaan Posyandu (H) Pada saat hari pelaksanaan posyandu, kader posyandu memiliki tugas dibagian pendaftaran balita, ibu hamil, dan pasangan usia subur; melakukan penimbangan, pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS; melakukan pencatatan pada KMS/ buku KIA, buku register ibu hamil (SIP), buku register PUS/WUS; melakukan penyuluhan untuk ibu balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui, PUS; pelayanan kesehatan dan KB.
3. Kegiatan di Luar Hari Buka Posyandu (H+) Setelah kegiatan posyandu dilakukan, kader posyandu masih memiliki tugas seperti mengadakan pemutakhiran data sasaran posyandu yaitu bayi, anak balita, ibu hamil, ibu menyusui dan membuat laporan bulanan dalam bentuk laporan SKDN.

2.2.2.3. Peran Kader POSYANDU dalam *Stunting*

Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita sehingga menjadi penting untuk ditangani karena menyangkut kualitas sumber daya manusia. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun akibat kekuarangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Stunting*, disamping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan

hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. *Stunting* diperkirakan menurunkan produk domestik bruto sekitar 3% per tahun (Sekwapres, 2018).

Kader merupakan salah satu ujung tombak perubahan dalam masyarakat. Kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam kegiatan kesehatan di masyarakat harus diberdayakan dalam mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat khususnya kesehatan. Salah satu kontribusi yang dapat kader lakukan adalah pemberdayaan kader untuk menyebarluaskan informasi kesehatan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah adanya kesamaan persepsi para kader Posyandu mengenai upaya peningkatan derajat kesehatan melalui penyebaran informasi kesehatan dan penguatan partisipasinya. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan kader Posyandu yang terstruktur dan komprehensif, dapat mendukung terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Rodiah et al., 2016).

Penelitian terkait pengetahuan kesehatan kader melakukan penelitian dalam memberdayakan kader pada bidang kesehatan (Citrakesumasari et al. 2020) menunjukkan bahwa ada korelasi signifikan terkait pengetahuan kesehatan yang diberikan kepada kader. Upaya pencegahan *stunting* dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang pengukuran status gizi (Isni et al., 2020).

Program yang dilakukan di YUM tidak terbatas pada kegiatan pengukuran dan status gizi saja. Tapi kader posyandu diberikan pembekalan setiap bulannya terkait hal-hal yang berhubungan dengan *stunting* dengan berbagai materi yang berbeda tiap bulannya. Program ini berlangsung selama 12 bulan dengan materi yang berbeda tiap bulannya.

2.2.3. Tinjauan tentang Penyuluhan Masyarakat

2.2.3.1. Pengertian Penyuluhan Masyarakat

Buku Manual Praktek Teknologi Pengembangan Masyarakat 2 Jurusan Pengembangan Sosial Masyarakat STKS Bandung (2008) menjabarkan tentang penyuluhan masyarakat. Secara harfiah, bersumber dari kata suluh yang berarti obor atau alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Dimaksudkan bahwa penyuluhan akan untuk memberi penerangan ataupun penjelasan kepada mereka yang disuluh agar tidak lagi berada dalam kondisi kegelapan mengenai masalah tertentu. Penyuluh adalah seseorang yang mewakili lembaga pemerintah atau non pemerintah yang bertugas mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan suatu program yang ditujukan untuk khalayak sasaran.

Penyuluhan adalah proses pembelajaran dan pertukaran informasi, pengetahuan, sikap dan keterampilan di antara pelaku dan penerima pembangunan kesejahteraan sosial agar mereka tahu, mau dan mampu mengoptimalkan perannya dalam setiap kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Penyuluhan merupakan bagian integral dari pembangunan kesejahteraan sosial yang berperan sebagai sarana peningkatan kesadaran para pembuat kebijakan dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial agar memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat tentang pentingnya investasi sosial.

Filosofi dasar penyuluhan masyarakat adalah “bekerja bersama” bukan “bekerja untuk” para penerima pelayanan kesejahteraan sosial dan pihak-pihak yang terkait. Penyuluhan sosial harus berlandaskan “*to work with people so that*

you can work independently” yaitu bekerja dengan orang sehingga mereka dapat bekerja secara mandiri.

2.2.3.2. Tujuan dan Fungsi Penyuluhan Masyarakat

Penyuluhan bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari keadaan yang ada. Perubahan kehidupan masyarakat tersebut mencakup setiap bidang, di segala segi dan dalam semua lapangan. Terdapat dua tujuan penyuluhan, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, yaitu (Kartasapoetra,1987) :

1. Tujuan Jangka Pendek
 - 1) Perubahan tingkat pengetahuan.
 - 2) Perubahan tingkat kecakapan atau kemampuan.
 - 3) Perubahan sikap.
 - 4) Perubahan motif tindakan.
2. Tujuan Jangka Panjang
 - 1) *Better farming*, mau dan mampu mengubah cara-cara usaha dengan cara-cara yang lebih baik.
 - 2) *Better business*, berusaha yang lebih menguntungkan.
 - 3) *Better living*, menghemat dan tidak berfoya-foya setelah tujuan utama telah tercapai.

Penyuluhan sosial memiliki berbagai macam fungsi. Dalam Pedoman Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI (2019) fungsi penyuluhan terbagi kedalam 4 jenis, yaitu (Lutfiah, 2022) :

1. Fungsi Preventif

Penyuluhan sosial ditujukan untuk meniadakan timbulnya problema sosial yang baru sebelum masalah sosial itu muncul, maka kegiatan penyuluhan dilakukan pada kelompok sasaran.

2. Fungsi Remedial (Kuratif/Rehabilitatif)

Penyuluhan sosial ditujukan untuk menanggulangi problema sosial yang telah timbul. Masalah sosial sudah muncul dan dirasakan oleh kelompok sasaran, sehingga perlu dilakukan solusi pemecahan masalah bersama, diantaranya melalui kegiatan penyuluhan.

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Penyuluhan sosial ditujukan untuk usaha pengembangan masyarakat, mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memiliki kemampuan lebih dalam mengatasi berbagai masalah yang ada.

4. Fungsi Penunjang (*Supportif*)

Penyuluhan sosial tidak hanya ditujukan pada bidang kesejahteraan sosial saja tetapi juga dapat menunjang program lain secara lintas sektor. Seperti penyuluhan tentang kesehatan yang berhubungan dengan *stunting* yang menjelaskan tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran, dimana program tersebut dapat menunjang tertib administrasi yang merupakan bagian dari Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah penyuluhan memiliki empat fungsi yang terdiri dari preventif, kuratif, rehabilitatif dan supportif. Masing-

masing fungsi penyuluhan didasarkan pada kondisi, masalah, serta kebutuhan masing-masing sasaran penyuluhan.

2.2.3.3. Metode Penyuluhan Sosial

Pesan dari penyuluhan akan tersampaikan dengan optimal apabila menggunakan cara (metode) penyampaian yang tepat. Pilihan metode sangat tergantung pada tujuan penyuluhan yang hendak di capai. Lucie Setiana (2005) menjelaskan mengenai metode kegiatan penyuluhan, yaitu sebagai berikut :

1. Metode berdasarkan pendekatan sasaran yang ingin dicapai

Berdasarkan pendekatan sasaran yang ingin dicapai, metode penyuluhan terbagi menjadi :

1) Metode berdasarkan pendekatan perorangan

Dalam metode ini, penyuluh berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sasarannya secara perorangan. Jumlah sasaran yang ingin dicapai, metoda ini kurang efektif karena terbatasnya jangkauan penyuluh untuk mengunjungi dan membimbing sasaran secara individu. Metode pendekatan individu lebih tepat digunakan dalam mendekati tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam suatu masyarakat. Menurut Van Den Ban dan Hawkins (dalam Lucie Setiana, 2005:49) metode pendekatan perorangan pada hakikatnya adalah paling efektif dan intensif dibanding metode lainnya, namun karena berbagai kelemahan di dalamnya, maka pendekatan ini jarang diterapkan pada program- program penyuluhan yang membutuhkan waktu yang relatif cepat. Termasuk dalam metode pendekatan perorangan atau personal approach antara lain: kunjungan

rumah, kunjungan ke lokasi, surat menyurat, hubungan telepon, kontak informal, magang dan lain sebagainya.

2) Metode berdasarkan pendekatan kelompok

Metode pendekatan kelompok, penyuluh berhubungan dengan sasaran penyuluhan secara kelompok. Metode pendekatan kelompok atau grup approach menurut Kartasaputra (dalam dalam Lucie Setiana, 2005:49) cukup efektif, dikarenakan sasaran dibimbing dan diarahkan secara kelompok untuk melakukan sesuatu kegiatan yang lebih produktif atas dasar kerja sama.

Dalam pendekatan kelompok banyak manfaat yang dapat diambil, disamping dari transfer teknologi dan informasi juga terjadinya tukar pendapat dan pengalaman antar-sasaran penyuluhan dalam kelompok. Metode kelompok pada umumnya berdaya guna dan berhasil guna tinggi, namun keberadaan kelompok yang kuat dan solid serta terorganisir dengan baik menjadi kendala bagi penyuluh. Selain itu metode kelompok lebih menguntungkan karena memungkinkan adanya umpan balik, dan interaksi kelompok yang memberi kesempatan bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma para anggotanya, termasuk metode pendekatan kelompok diantaranya adalah demonstrasi hasil, temu karya, temu lapang, temu usaha, mimbar sarasehan, perlombaan dan lain sebagainya.

3) Metode berdasarkan pendekatan massa

Metode pendekatan massal atau mass approach. Metode ini menjangkau sasaran dengan jumlah yang cukup banyak. Metoda ini cukup baik dari segi penyampaian informasi, namun terbatas hanya dapat menimbulkan kesadaran atau keingintahuan semata. Metoda ini mempercepat proses perubahan, namun jarang dapat mewujudkan perubahan dalam perilaku. Hal ini disebabkan karena pemberi informasi dan penerima pesan cenderung mengalami proses selektif saat menggunakan media massa sehingga pesan yang disampaikan mengalami distorsi (Van Den Ban dan Hawkins dalam Lucie Setiana, 2005:50). Termasuk dalam metode ini antara lain rapat umum, siaran radio, kampanye, pemutaran film, penyebaran leaflet, poster, surat kabar dan lain sebagainya.

4) Metode berdasarkan teknik komunikasi

Berdasarkan teknik komunikasi, metode penyuluhan dibedakan menjadi 2 yaitu langsung (*face to face communication*) dan tidak langsung (*indirect communication*). Metode penyuluhan langsung dilakukan oleh penyuluh yang berhadapan dengan sasaran, sedangkan tidak langsung menggunakan perantara diantara penyuluh dan sasaran.

5) Metode berdasarkan indera penerima

Berdasarkan indera penerima pada sasaran metode penyuluhan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :

- 1) Metode yang dapat dilihat misalnya pemutaran film, pemutaran slide, penyajian poster atau gambar-gambar menarik.

- 2) Metode yang dapat didengar misalnya pemutaran kaset rekaman, radio, ceramah.
- 3) Metode yang dapat dilihat dan didengar misalnya demonstrasi hasil dapat didengar, dilihat bahkan diraba atau disentuh.

2.2.3.4. Prinsip Penyuluhan Masyarakat

Prinsip penyuluhan masyarakat memiliki sedikitnya empat prinsip atau pedoman dasar penyuluhan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik. Prinsip itu adalah:

1. **Individualisasi.** Penyuluh memahami bahwa setiap orang memiliki kemampuan unik dan berbeda-beda. Penyuluh akan menerapkan cara dan gaya yang tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan latar belakang dengan orang yang terlibat.
2. **Akseptansi.** Penyuluh bersifat terbuka dan mau menerima siapa saja tanpa mengkaitkannya dengan latar belakang agama, ras, status sosial, dan masalah yang dialami oleh orang lain.
3. **Tidak Menilai.** Penyuluh tidak menilai atau menghakimi salah, benar perbuatan orang lain berdasarkan nilai dan kepercayaan yang dianut pendamping
4. **Situasional.** Penyuluh menggunakan berbagai macam sarana atau alat-alat penyuluhan agar dapat menyesuaikan diri dengan kemampuan orang dan keadaan lingkungan tertentu.

2.2.3.5. Tahapan Program Penyuluhan

Sasaran program penyuluhan adalah agar masyarakat dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disampaikan dengan baik dan benar

dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru tersebut dalam kehidupannya. Menurut Notoadmodjo (2007) dalam Muchlisin (2020), indikasi keberhasilan yang dapat dilihat pada diri seseorang pada setiap tahapan proses penyuluhan adalah sebagai berikut :

1. **Tahap sadar (*awarness*)**. Pada tahap ini seseorang sudah mengetahui sesuatu yang baru karena hasil dari berkomunikasi dengan pihak lain.
2. **Tahap minat (*interest*)**. Pada tahap ini seseorang mulai ingin mengetahui lebih banyak tentang hal-hal baru yang sudah diketahuinya dengan jalan mencari keterangan atau informasi yang lebih terperinci.
3. **Tahap menilai (*evaluation*)**. Pada tahap ini seseorang mulai menilai atau menimbang-menimbang serta menghubungkan dengan keadaan atau kemampuan diri, misalnya kesanggupan serta resiko yang akan ditanggung baik dari segi sosial maupun ekonomi.
4. **Tahap mencoba (*trial*)**. Pada tahap ini seseorang mulai menerapkan atau mencoba dalam skala kecil sebagai upaya meyakinkan apakah dapat dilanjutkan atau tidak.
5. **Tahap penerapan atau adopsi (*adoption*)**. Pada tahap ini seseorang sudah yakin akan hal baru dan mulai melaksanakan dalam skala besar.

2.2.3.6. Faktor yang Mempengaruhi Penyuluhan

Penyuluhan merupakan proses perubahan perilaku melalui suatu kegiatan pendidikan non-formal. Maulana (2009) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses perubahan keadaan yang disebabkan karena penyuluhan, yaitu:

1. Keadaan pribadi sasaran.

Beberapa hal yang perlu diamati pada diri sasaran penyuluhan adalah ada tidaknya motivasi pribadi sasaran penyuluhan dalam melakukan suatu perubahan. Berikutnya, adanya ketakutan atau trauma di masa lampau yang berupa ketidakpercayaan pada pihak lain karena pengalaman kegagalan, kekurangsiapan dalam melakukan perubahan karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan, saran, dan pengalaman serta adanya perasaan puas dengan kondisi yang dirasakan sekarang tanpa harus melakukan perubahan.

2. Keadaan lingkungan fisik.

Lingkungan fisik dalam hal ini adalah lingkungan yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam keberhasilan penyuluhan.

3. Keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Sebagai pola perilaku sudah sewajarnya apabila kondisi sosial budaya di masyarakat akan mempengaruhi efektivitas penyuluhan karena kondisi sosial budaya merupakan suatu pola perilaku yang dipelajari, dipegang teguh oleh setiap warga masyarakat dan diteruskan secara turun-temurun dan akan sangat sulit merubah perilaku masyarakat jika sudah berbenturan dengan keadaan sosial budaya masyarakat.

4. Keadaan dan macam aktivitas.

Kelembagaan yang tersedia dan menunjang Kegiatan Penyuluhan. Ada tidaknya peran serta terkait dalam proses penyuluhan akan menentukan efektivitas penyuluhan. Dalam hal ini lembaga berfungsi sebagai pembuat keputusan yang akan ditetapkan sehingga harus dilaksanakan oleh masyarakat.

5. Ketersediaan waktu di masyarakat.

Waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat aktivitas masyarakat untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam penyuluhan.

2.2.3.7. Metode, Teknik dan Media Penyuluhan Masyarakat

1. Metode Penyuluhan

Metode yang dapat digunakan dalam penyuluhan masyarakat adalah :

1. Surat menyurat, metode dengan menggunakan barang cetakan yang dikirim kepada kelompok sasaran, misalnya seperti leaflet, brosur, booklet, buletin, majalah, gambar, dan lain-lain.
2. Kunjungan, dibagai dua: *anjangsana*: kunjungan penyuluh langsung ke rumah atau tempat tinggal kelompok sasaran untuk bertemu dengan kelompok sasaran dan *anjangkarya*: kunjungan penyuluh ke lokasi dimana kelompok sasaran melakukan aktivitasnya.
3. Karyawisata, sering disebut sebagai studi banding atau kunjungan lapangan. Penyuluh diajak keuntuk melihat atau mengunjungi objek yang dijadikan sasaran penyuluhan.
4. Demonstrasi, metode yang digunakan untuk membuktikan keunggulan dari suatu pelayanan
5. Ceramah, diskusi, pertemuan umum
6. Pameran
7. Pertunjukan seni, etode dengan menggunakan kesenian masyarakat baik yang bersifat tradisional maupun modern dalam menyampaikan pesan materi penyuluhan.

8. Media cetak, pamflet, leaflet, dan lain-lain
9. Film
10. Permainan peran

2. Teknik Penyuluhan

Penyuluhan masyarakat juga memiliki teknik-teknik sebagai berikut :

1. Berbicara atau berkomunikasi
2. Memotivasi
3. Penyajian materi
4. Pemilihan dan penggunaan alat bantu
5. Timing
6. Fokus
7. Diferensiasi diagnosis
8. *Partialization*
9. Observasi
10. Evaluasi
11. Negosiasi
12. Orator
13. *Need assesment*
14. Perencanaan penyuluhan

3. Media Penyuluhan Masyarakat

Media terbaru dalam penyuluhan masyarakat adalah dengan menggunakan teknologi ilmu komputer yaitu pemanfaatan jaringan internet. Berikut media-media yang dapat digunakan sebagai media penyuluh masyarakat.

1. Media elektronik : radio, kaset, televisi
2. Media cetak : leaflet, brosur, booklet, buletin, majalah, gambar, dan lain-lain.
3. Media alternatif : fotografi, videografi
4. Media sosial : *WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube, Zoom*, dan lainnya.

2.2.3.8. Proses dalam Penyuluhan Masyarakat

Proses penyuluhan dalam masyarakat dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu :

1. Penyuluhan sebagai proses penerangan

Proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang belum diketahui untuk dilaksanakan atau diterapkan dalam rangka peningkatan pendapatan yang ingin dicapai.

2. Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku

Tujuan sebenarnya dari penyuluhan adalah adanya perubahan perilaku sasarannya. Merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung dengan indera manusia.

3. Penyuluhan sebagai proses pendidikan

Penyuluhan merupakan proses pendidikan non formal dan pendidikan orang dewasa.

1. Penyuluhan adalah sistem pendidikan non formal

- 1) Terencana atau terprogram
- 2) Dapat dilakukan dimana saja, *indoor* atau *outdoor*
- 3) Tidak terikat waktu, baik penyelenggara maupun jangka waktunya
- 4) Disesuaikan dengan kebutuhan sasaran

5) Pendidikan dapat berasal dari salah satu peserta didik

6) *Outcome* harus jelas dan terlihat segera

2. Penyuluhan merupakan pendidikan orang dewasa

1) Metode pendidikan lebih bersifat lateral yang saling mengisi dan berbagi pengalaman dibanding pendidikan yang sifatnya vertikal atau menggurui

2) Keberhasilannya tidak ditentukan oleh jumlah materi atau informasi yang disampaikan tetapi seberapa jauh tercipta dialog antar pendidik dan peserta didik.

3) Sasarannya adalah orang dewasa

2.2.4. Tahapan Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Pekerjaan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan dan kewajiban untuk membantu atau menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga mereka nantinya mampu mencari jalan sendiri. Tahapan pekerjaan sosial menurut Max Siporin yang dikutip oleh Wibhawa (2010) adalah sebagai berikut :

1. Tahap *Engagement, Intake* dan *Contract*

Engagement merupakan suatu periode dimana orang yang mempunyai masalah biasanya berusaha untuk menghubungi pekerja sosial yang dapat menolongnya memberi pelayanan agar dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya (*helping services*). Disini pekerja sosial siap memberikan pelayanan dan menyediakan sumber bagi siapa saja yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan untuk itu. Pada tahap ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi :

1) Klien datang dengan sukarela untuk meminta pertolongan/bantuan

(Voluntary Application)

2) Klien tidak mau datang secara sukarela (*Involuntary Application*)

3) Pekerja sosial berusaha untuk mencari klien (*Reaching out effort by worker*)

Intake adalah kontak awal pekerja sosial (peksos) dengan calon klien/ calon penerima manfaat. Disini peksos berkenalan, menjalin rapport yang baik dengan calon penerima manfaat. *Intake* bertujuan untuk memperoleh pengakuan dan kepercayaan serta persetujuan dari calon klien untuk menyelesaikan permasalahannya. Tahapan akhir adalah *contract* yaitu antara klien dan peksos saling berkomitmen untuk bekerjasama menyelesaikan permasalahan.

2. Tahap *Assessment*

Tahapan proses penggalian dan pemahaman masalah yang dihadapi klien. Dengan demikian akan terlihat bentuk masalah, faktor penyebab dan akibat serta pengaruh masalah.

3. Tahap *Planning*

Rencana proses penyusunan pemecahan masalah yang dihadapi klien. Rencana tersebut meliputi tujuan pemecahan masalah, sasaran serta cara memecahkan masalah.

4. Tahap *Intervention*

Tahap pelaksanaan pemecahan masalah, dalam pelaksanaan kegiatan ini klien diharapkan mengikuti proses pemecahan masalah secara aktif.

5. Tahap *Monitoring & Evaluation*

Tahapan untuk melakukan kontrol atas kegiatan intervensi yang sedang dilakukan serta pada akhir perencanaan program akan dilakukan evaluasi

terhadap kegiatan intervensi yang sudah dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat tingkat keberhasilan, hambatan yang dialami oleh klien.

6. Tahap *Termination*

Tahap pengakhiran atau pemutusan kegiatan intervensi, hal ini dilakukan bila tujuan intervensi telah tercapai atau permintaan klien sendiri atau karena faktor-faktor tertentu.

2.2.4.1 Monitoring & Evaluation Program

Proses evaluasi secara tipikal merupakan suatu proses yang berkelanjutan (ongoing process), sehingga kita harus selalu menilai apakah tujuan-tujuan jangka pendek yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Evaluasi juga dapat dipandang sebagai tahap akhir dalam sebuah kegiatan, yang seringkali mendasari suatu keputusan bersama antara pekerja sosial dengan klien untuk mengakhiri hubungan profesional yang terjalin (*Termination*).

Kettner dan Nichols, 1985 (dalam Ashman, 1993) seringkali membedakan antara evaluasi dan monitoring, yang menyebutkan bahwa monitoring dan evaluasi memiliki fungsi saling melengkapi (complementary). Monitoring merupakan upaya untuk melihat proses pemberian pelayanan, sedangkan evaluasi merupakan upaya untuk melihat efektivitas pelayanan.

Suharto (2010) menyatakan monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap suatu program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap suatu program yang telah selesai atau minimal telah berjalan selama tiga bulan. Suharto juga menjelaskan mengenai tujuan monev yaitu untuk mengetahui apakah program yang telah

berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mengetahui saran yang baik untuk digunakan. Sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana program sudah tercapai dan akibat atau dampak yang ditimbulkan dari program yang telah dilakukan.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah monitoring merupakan praktik yang melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap berbagai aspek yang terkait dengan suatu sistem atau individu. Monitoring memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tujuan, standar, atau kebijakan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif. Dalam konteks organisasi, monitoring membantu memantau kinerja orang dalam organisasi, mengukur pencapaian target, dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan strategis.

Lima sasaran MONEV (Own dan Rogers dalam Suharto, 2010) adalah :

1. Program, untuk mencapai perubahan diperlukan kegiatan atau aktivitas yang dikenal dengan kata program.
2. Kebijakan, sesuatu yang telah tetap berisi prinsip-prinsip dan digunakan untuk mengarahkan pada pencapaian tujuan.
3. Organisasi, wadah yang menjadi tempat perkumpulan orang yang ingin mencapai tujuan baru.
4. Produk atau hasil, hasil yang diperoleh dari kegiatan/program tertentu bisa baik bisa buruk.
5. Individu, orang atau manusia yang berada didalam suatu wadah yang disebut organisasi.

Penelitian ini fokus pada kegiatan monitoring yang berkaitan dengan intervensi YUM kepada Kader Posyandu dan CL. Tujuannya adalah untuk melihat apakah Kader Posyandu memberikan penyuluhan pencegahan *stunting* kepada masyarakat dan seberapa besar penyebaran informasi tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui metode, waktu yang tepat untuk menyebarkan informasi mengenai *stunting* kepada masyarakat, khususnya para ibu yang hamil, menyusui dan memiliki anak balita.

2.2.5. Tinjauan tentang *Training for Trainer (ToT)*

Training of Trainer dalam bahasa Indonesia adalah Pelatihan untuk Pelatih. Definisi secara luasnya adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain. Lokakarya ToT dapat membangun kumpulan orang yang kompeten yang kemudian dapat mengajarkan materi tersebut kepada orang lain.

Training atau pelatihan dapat didefinisikan sebagai proses pemindahan pengetahuan dan keterampilan dari seseorang kepada orang lain sehingga orang lain tersebut menjadi cakap dalam pekerjaannya. Kegiatan tersebut tidak dibatasi oleh lokasi ataupun formalitasnya karena dimana pun tempatnya, apabila terjadi suatu proses pemindahan pengetahuan/keterampilan kepada orang lain maka itu bisa dikatakan sebagai training.

Hasil dari mengikuti ToT, peserta akan dapat (National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion 2017) :

1. Menerapkan praktik riset berbasis bukti terkini.

2. Memberikan keterampilan fasilitatif yang telah terbukti untuk mendorong keterlibatan pelajar, praktik reflektif, pemikiran kritis, dan perolehan keterampilan.
3. Tunjukkan penguasaan dalam menyampaikan strategi pelatihan utama yang biasa digunakan; seperti, curah pendapat, pemeriksaan pemrosesan/proses, permainan peran, dan sesi latihan.
4. Gunakan tingkat intervensi yang tepat ketika mengelola situasi pelatihan yang sulit, termasuk perilaku pembelajar yang mengganggu.
5. Memulai rencana tindakan pribadi untuk memperkuat pelatihan dan keterampilan fasilitasi mereka.

ToT memiliki 3 tahapan pelaksanaan. Tiap tahapan pelatihan mempunyai tujuan yang berbeda, yaitu :

1. Pelatihan ketrampilan melatih (*training delivery*)

Dilakukan juga dalam rangka untuk memberikan kemampuan penguasaan materi kepada para trainer agar para trainer bisa memberikan pelatihan terhadap suatu subyek. Oleh karena itu kita sering mendengar kata TOT diikuti dengan subyek kata yang lain, namun pada dasarnya tujuan kegiatan itu tetap sama, yaitu agar peserta pelatihan mampu melatih.

2. Pelatihan menyusun langkah atau tahapan melatih (*session design*)

Pelatihan yang ditujukan agar para trainer dapat menyusun dan merancang sebuah materi pelatihan. Dalam kegiatan merancang sebuah pelatihan maka seorang trainer harus melakukan beberapa hal, yaitu:

- 1) Identifikasi kebutuhan Training

- 2) Merumuskan tujuan Training
 - 3) Menyusun Silabus
 - 4) Cara penyajian materi training
 - 5) Membuat metode evaluasi
3. Pelatihan ketrampilan mendisain kurikulum pelatihan (*curriculum design*)

Para trainer diharuskan mampu membuat silabus training. Silabus berbeda dengan materi.

2.2.6. Tinjauan tentang Teknologi Informasi Komunikasi

Istilah teknologi informasi mulai marak sekitar 1970-an bersamaan dengan kemajuan komputer dan telekomunikasi. Komputer dan telekomunikasi merupakan tulang punggung teknologi informasi. Teknologi informasi adalah penggunaan teknologi untuk pengadaan, penyimpanan, temu balik, analisis, dan komunikasi informasi dalam bentuk data numerik teks atau tekstual, citra atau suara, terutama dengan menggunakan mikroprosesor beserta berbagai aspeknya. Dalam teknologi informasi terdapat dua komponen utama yaitu komputer dan telekomunikasi (Basuki, 1998).

Teknologi informasi terdiri atas kata teknologi dan informasi. Teknologi informasi merupakan hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Hasil dari pemanfaatan teknologi informasi adalah pengiriman informasi yang menjadi lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Teknologi informasi tidak pernah terlepas dari internet. Internet merupakan singkatan dari *internetworking of networks*, yang merupakan jaringan komputer yang luas dari jaringan komputer. Internet

merupakan gabungan dari berbagai jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Konsep internet terdiri atas dua bagian yang berbeda, yaitu jaringan komunikasi dan komputer. Jaringan komunikasi meliputi jaringan kawasan lokal dan luas yang saling terkoneksi, sambungan telepon, kabel, serat optik dan sambungan satelit yang menyediakan medium (perantara) transfer informasi di internet, sedangkan komputer dan situs komputer merupakan tempat nyata menyimpan dan mengolah data yang siap ditransmisi melalui jaringan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peralatan elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media (Rusman, 2012).

Penerapan teknologi informasi melalui internet dapat berupa penggunaan website. Ada dua jenis tool website, yaitu website manager dan website server. Website manager adalah tool yang tidak hanya memungkinkan untuk melakukan edit halaman-halaman Web individual sebagaimana dilakukan tool-tool text editor HTML, tetapi juga memberi kesempatan untuk me-manage seluruh dokumen dan struktur website. Website server merupakan tool-tool development dan pelayanan Web komplet dalam sebuah server, dan dilengkapi dengan Web editor untuk memproduksi halaman-halaman Web.

2.2.6.1. Internet

Internet merupakan singkatan dari interconnected network karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia. Dari satu fungsi itu, internet semakin berkembang dan memiliki banyak manfaat bagi perkembangan dunia. Secara definitif, internet adalah sebuah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer dari berbagai belahan dunia untuk saling terhubung dan bertukar data serta bertukar informasi. Dalam prakteknya, sebuah komputer untuk saling terhubung dengan komputer lainnya membutuhkan bantuan dari sebuah program kecil bernama browser. Di dunia ini, perkembangan aplikasi browser telah berkembang secara cepat mengikuti perkembangan teknologi pada internet, khususnya koneksi internet dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Dalam perkembangannya, internet menjadi sebuah jaringan (*network*) komputer terbesar di dunia. (Jaringan merupakan istilah yang berarti sekelompok komputer yang dihubungkan bersama sehingga dapat berbagi-pakai informasi dan sumber daya). Sesuai dengan namanya, internet bukan jaringan tunggal tetapi lebih merupakan jaringan dari jaringan. Internet mengandung sejumlah standar untuk melewatkan informasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya, sehingga jaringan-jaringan di seluruh dunia dapat berkomunikasi.

2.2.6.2. Google dan Google Forms

Produk teknologi seperti komputer, tablet dan smartphone saat ini sudah tidak asing lagi masyarakat. Koneksi internet yang murah juga menjadi peluang untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu software yang mudah diakses, gratis, sederhana dalam pengoperasian, dan cukup baik untuk

dikembangkan sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja kader Posyandu adalah *Google Forms*.

Google merupakan salah satu dari mesin pencari (search engine) di web yang paling sering digunakan. Google mempunyai berbagai produk layanan salah satunya adalah *Google Forms*. *Google Forms* merupakan alat yang berguna untuk membantu penggunaannya dalam merencanakan acara, mengirim survei, memberikan kuis kepada orang lain, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien.

Google Forms merupakan salah satu komponen layanan *Google Docs*. Aplikasi ini sangat cocok untuk mahasiswa, guru, dosen, pegawai kantor dan profesional yang senang membuat quiz, form dan survey online. Fitur dari *Google Forms* dapat di bagi ke orang-orang secara terbuka atau khusus kepada pemilik akun Google dengan pilihan aksesibilitas, seperti: read only (hanya dapat membaca) atau editable (dapat mengedit dokumen). Selain itu, Google docs juga dapat menjadi alternatif bagi orang-orang yang tidak memiliki dana untuk membeli aplikasi berbayar (Batubara 2016).

Aplikasi *Google Forms* merupakan aplikasi berbasis web. Setiap orang dapat memberikan tanggapan atau jawaban terhadap kuis ataupun kuisioner secara cepat dimanapun ia berada dengan menggunakan aplikasi internet komputer/laptop ataupun Handphone. Aplikasi ini dapat mempermudah seorang guru atau pegawai agar tidak memerlukan kertas lagi untuk mencetak kuis atau kuisionernya. Waktu yang diperlukannya juga akan semakin hemat dalam membagikan, mengumpulkan kembali dan menganalisis hasil kuis dan angketnya. Dengan demikian, aplikasi ini

sangat cocok digunakan untuk mengumpulkan pendapat sekelompok orang yang berjauhan dan sulit dikumpulkan, mengelola pendaftaran acara atau sekolah melalui halaman internet, mengumpulkan data-data, membuat kuis mendadak, dan banyak lagi.

Pembuatan alat ukur, metode penyuluhan yang tepat serta bukti aktivitas kader Posyandu pada proses penyuluhan *stunting* dengan menggunakan *Google Forms* diyakini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana luasan informasi serta metode atau teknik yang efektif dan efisien untuk menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat. YUM sebagai penyelenggara *Google Forms* akan merasa terbantu dengan kemampuan *Google Forms* dalam merekapitulasi data tersebut dan menyajikannya dalam bentuk presentasi yang nyaman kepada stakeholder terkait. Penggunaan *Google Forms* sebagai alat survey juga mendukung program penghematan kertas sebagai wujud peduli lingkungan. Pada *Google Forms* juga bisa memasukkan foto dan video sebagai bukti bahwa kader posyandu sudah melakukan penyuluhan kepada masyarakat target sasaran.

2.2.6.3. Pemanfaatan TIK oleh Pekerja Sosial

Menelisik perkembangan masyarakat 4.0 yang berkarakter masyarakat informasi (*information society*) dan ditandai dengan perkembangan komputer serta internet dalam teknologi informasi dan komunikasinya, maka saat ini dunia sedang menyongsong era masyarakat 5.0. Pada era masyarakat 5.0 peradaban manusia dalam hubungannya dengan teknologi, mencoba membawa kembali peradaban sesungguhnya dalam perkembangan teknologi yang berpusat pada manusia (*Human Centered Technology Based*), seperti yang dituturkan oleh Perdana

Menteri Shinzo Abe pada *World Economic Forum* (WEF) yang diselenggarakan di Davos, Swiss pada 23 Januari 2019 (Raditya, 2019).

Menurut Zorn et al, (2011) dan Berzin et al., (2015) sebagai pembanding pada sektor bisnis, bidang pekerjaan sosial masih terhambat dalam mengadopsi perkembangan teknologinya. Profesi pekerjaan sosial memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi yaitu tidak hanya dalam rangka memanfaatkan kekuatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan praktik saja, melainkan hal yang paling penting adalah memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan untuk mendukung produk-produk sosial. Faktanya, saat ini kebermanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak memberi dampak sosial yang baik dengan skala yang lebih besar (Santoso et al. 2020).

Voshel & Wesala (2015) mengungkap ketika perkembangan teknologi internet telah digunakan dalam berbagai sendi kehidupan, maka kemajuan teknologi telah mengancam keamanan ekonomi dan kehidupan pribadi. Kemajuan ini pun telah mengubah wajah komunikasi untuk selamanya. Perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah cara pandang, perilaku, sifat dan karakteristik pola pelayanan sosial dengan mengadopsi perubahan teknologi itu sendiri. Ketika teknologi informasi dan komunikasi digunakan dengan bijaksana dan efektif, maka hal ini dapat meningkatkan berbagai metode praktik pekerjaan sosial, yaitu pemberian pelayanan, pendidikan, dan penelitian (Perron et al, 2010).

Pelayanan sosial merupakan aktivitas yang sangat lekat dengan profesi pekerja sosial dan tentunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

adalah sebuah proses transformasional yang tidak dapat dihindari dan membawa konsekuensi untuk memikirkan kembali tantangan dan peluang bagi profesi pekerjaan sosial (Berzin et al, 2015).

Kondisi saat ini “memaksa” penyedia layanan sosial yang secara rutin telah memberikan pelayanan untuk melakukan perubahan baik pada aspek manajemen program maupun pada sisi manajemen pelayanan sosialnya. Saat ini beberapa lembaga pelayanan sosial banyak menggunakan media sosial untuk mendukung dan mengoptimalkan berbagai aktivitasnya (Santoso et al. 2020).

Demikian juga dengan peluang yang ditangkap oleh beberapa bentuk lembaga pelayanan sosial lainnya yang bermetamorfosis sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi digitalisasi, yaitu di antaranya adalah beberapa lembaga yang melakukan pelayanan jasa konseling. Semisal kegiatan konseling yang dilakukan melalui media Instagram yang dimotori oleh para mahasiswa Kesejahteraan Sosial Fisip Unpad dengan nama akun Instagram *Ask A Pro*, yang bergerak atas dasar kepedulian terhadap perilaku *self-diagnose* di masyarakat, terutama perilaku yang keliru dalam mendiagnosis diri sendiri berdasar informasi kesehatan mental yang didapatkan dari internet. Pelayanan sosial sejenis yang dilakukan melalui Instagram yaitu Sorai Tubuhku yang berisi edukasi seksual di kalangan remaja, khususnya mengenai perilaku *sexting* serta dampaknya dalam kehidupan. Tim ini bekerja sama dengan organisasi PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) untuk mengedukasi remaja seputar perilaku seksual dan kesehatan seksual (FISIP Unpad, 2019).

Jurnal ilmiah yang berjudul "Transformasi Praktik Pekerjaan Sosial Menuju Masyarakat 5.0" menyimpulkan bahwasanya pekerja sosial harus dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung serta memudahkan kegiatan pekerjaan sosial. Baik itu dengan cara memanfaatkan fasilitas dari aplikasi yang tersedia atau bahkan membuat platform yang disesuaikan dengan kebutuhan.

2.2.7. Tinjauan tentang Teknologi Perubahan Komunitas secara Partisipatif

Pengembangan masyarakat yang diterjemahkan dari kata *community development* terdiri dari kata pengembangan (*development*) dan masyarakat atau komunitas (*community*). Istilah *development* seringkali dimaknai sebagai pembangunan, sehingga terdapat kesamaan makna antara pengembangan dan pembangunan. Terdapat banyak aspek dalam pengembangan atau pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang kesemuanya merupakan aspek kehidupan manusia sebagai individu maupun kelompok. Pengembangan atau pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mengarahkan individu maupun kelompok tersebut ke arah perbaikan kualitas hidup yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat. Proses terhadap salah satu metode pekerjaan sosial tersebut dilakukan dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Pengembangan masyarakat merujuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat yang turut terlibat dalam setiap prosesnya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu program pembangunan atau usaha kesejahteraan sosial (Suharto, 2010).

Proses pengembangan masyarakat secara partisipatif yang melibatkan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan, metode, teknik, atau teknologi tertentu yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pekerja sosial maupun masyarakat dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dari pengembangan masyarakat secara partisipatif agar dapat berjalan secara efektif. Mardikanto dan Soebianto (2015) menguraikan sejumlah pendekatan, metode, teknik atau teknologi partisipatif dalam pembangunan masyarakat sebagai berikut:

- 1) *Rapid Rural Appraisal (RRA)*
- 2) *Participatory Rural Appraisal (PRA)*
- 3) *Participatory Impact Monitoring (PIM)*
- 4) *Focus Group Discussion (FGD)*
- 5) *Participatory Learning and Action*
- 6) Kemitraan
- 7) Pelatihan Partisipatif

2.2.7.1. *Participatory Impact Monitoring (PIM)*

PIM merupakan salah satu peralatan baru untuk mengelola sebuah program. PIM didesain bagi program-program yang dikelola secara *self-help initiation* atau *grassroots organization* untuk menolong dirinya sendiri (*self help project*) dan dikoordinasi oleh pemimpin lokal. Program yang biasanya dijalankan oleh organisasi lokal ini didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan masyarakat yang menjadi anggota organisasi lokal tersebut dalam perencanaan kegiatan, serta penerapan PIM dilakukan ketika program sedang berjalan.

Pendekatan PIM dalam siklus program berfungsi memberi panduan dalam mengendalikan jalannya suatu program di lapangan. Pengenalan metodologi PIM dilakukan dalam rangka memperkuat kebersamaan di antara para anggotanya hingga pada akhirnya kelompok tersebut difasilitasi oleh para anggotanya sendiri. Serta, fasilitator dari luar perlahan melepaskan peran-peran teknisnya dalam pengelolaan organisasi masyarakat lokal.

Penerapan PIM dalam pengembangan masyarakat dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan komunitas masyarakat melalui suatu kelompok untuk mengamati, merefleksikan, mengambil keputusan, dan memperkuat struktur organisasi masyarakat lokal dengan cara mengarahkan aktivitas dalam program untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dari kebersamaan diantara mereka.

2.2.8. Rekayasa Teknologi Pekerjaan Sosial

Rekayasa teknologi (*engineering technology*) adalah aplikasi praktis ilmu pengetahuan untuk mengatasi berbagai masalah dalam dunia nyata. Berdasarkan pengertian ini rekayasa teknologi pada dasarnya merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sugeng Pujileksono dkk mengemukakan bahwa “rekayasa teknologi pekerjaan sosial adalah proses membuat desain, modifikasi, pengembangan, atau menciptakan teknologi baru guna meningkatkan proses atau fungsi yang ada” (Pujileksono et al., 2021).

Yuliani dan Pujileksono menawarkan 8 langkah riset pengembangan untuk kepentingan rekayasa teknologi yang dikembangkan dari para ahli yaitu Borg dan Gall (1989) dan Sugiyono (2016) dan juga berdasarkan pada langkah-langkah

desain rekayasa teknologi model STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematic). Langkah-langkah tersebut adalah :

1. Riset Pendahuluan dan Identifikasi Masalah
2. Pembahasan Pemecahan Masalah
3. Membuat Desain Rekayasa
4. Uji Coba Terbatas
5. Revisi Desain 1
6. Uji Coba Meluas
7. Revisi Desain Akhir
8. Diseminasi Hasil Rekayasa

Kedelapan langkah riset pengembangan tersebut di atas merupakan upaya untuk menyederhakan langkah-langkah riset pengembangan model Borg dan Gall (1989) dan Sugiyono (2016) tanpa bermaksud mengurangi substansi secara metodologis. Dengan memadukan desain rekayasa model STEM, diharapkan ke delapan langkah yang ditawarkan dapat mengintegrasikan kegiatan praktik dan riset untuk kepentingan rekayasa teknologi pekerjaan sosial. Melalui delapan langkah tersebut, diharapkan semakin banyak teknologi baru yang dapat diterapkan pada praktik pekerjaan sosial (Pujileksono 2021).

2.2.9. Kajian Praktik Pekerjaan Sosial Makro (masyarakat) dengan Kemiskinan

2.2.9.1. Definisi Pekerjaan Sosial

Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (National Association of Social Workers - NASW, 2013) – dalam Adi Fahrudin (2018) pada Asian Social Work Journal, merumuskan pekerjaan sosial sebagai berikut:

“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consists of the professional application of social work values, principles, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes” (NASW, 2013).

“Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut: membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok; membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan-pelayanan sosial dan kesehatan; dan ikut serta dalam proses-proses legislatif yang berkaitan.”

Pekerjaan sosial sebagai aktivitas pertolongan (*helping profession*) adalah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Pekerjaan sosial didasari oleh tiga kompetensi penting, yakni kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skill*), dan kerangka nilai (*body of value*). Secara interaktif, ketiganya menjadi dasar penting dalam praktik ilmu pekerjaan sosial.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional yang berpraktek berdasarkan pada suatu keahlian yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai atau etika. Adapun tujuan pekerjaan sosial yaitu membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya serta menciptakan kondisi sosial yang mampu meningkatkan harkat dan martabat orang.

2.2.9.2. Definisi Masyarakat/Komunitas (Community)

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan (Cahyono 2020). Masyarakat juga merupakan sistem sosial yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial yaitu: keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berinteraksi, berelasi, dan saling ketergantungan (Jabrohim, 2004).

Menurut Mac Iver dan Page dalam Soekanto masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah. Masih menurut Mac Iver dan Charles dalam Soekanto unsur-unsur perasaan masyarakat antara lain adalah seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan, sedangkan tipe-tipe masyarakat menurut Kingley Davis dalam Soekanto (2007: 134-135) ada empat kriteria yaitu :

1. Jumlah penduduk
2. Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman
3. Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat
4. Organisasi masyarakat yang bersangkutan

Dalam bukunya M. Zaini Hasan dkk., (1996) banyak menjelaskan definisi masyarakat menurut para ahli. Diantaranya menurut Horton yang mengatakan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama dalam waktu relatif lama mendiami kawasan tertentu, memiliki kebudayaan relatif lama, serta melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut. Lebih lanjut mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki pembagian kerja yang berfungsi khusus dan saling tergantung (*interdependent*), dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota, yang memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, serta mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur.

Buku tersebut juga mengutip pernyataan Banks, Clegg dan Stewart mengenai masyarakat yang mengatakan bahwa “masyarakat adalah suatu kelompok hidup manusia disuatu wilayah tertentu, yang telah berlangsung dari generasi ke generasi, dan sedikit banyak independen (*self sufficient*) terhadap kelompok hidup lainnya”.

Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam wilayah tertentu dan saling berinteraksi serta memiliki kebudayaan sekaligus norma yang mengatur kegiatan para anggota, yang memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, serta mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan sudah melakukan aktivitas cukup lama dalam lingkungan kelompok tersebut.

2.2.9.3. Pengertian Kemiskinan

Hall dan Midgley (2010) menjelaskan pengertian kemiskinan adalah kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat (Patria Nagara, Misharni 2022).

Kriteria penduduk miskin menurut BPS adalah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) (BPS, 2020). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lainnya)
2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan : “*The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other*”. Dari definisi tersebut diartikan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang tidak dapat menentukan pilihan dan kesempatan sebagai kebutuhan dasar manusia meliputi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. Pengertian kemiskinan dalam cakupan yang lebih luas adalah keterbatasan manusia yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara (Masrofah 2020).

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional yang terdiri dari dua aspek yakni aspek primer, berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder, berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Kemiskinan terwujud dengan bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat Pendidikan yang rendah (Masrofah 2020).

Kemiskinan dalam pengertian umum, merupakan suatu kondisi kurang terpenuhinya kebutuhan orang. Kebutuhan pangan dasar, perumahan, pelayanan kesehatan, serta rasa aman pada umumnya dilandaskan pada nilai ketercukupan yang diakui bersama sesuai dengan martabat manusia. Namun demikian, apa yang

dianggap cukup oleh satu orang belum tentu dianggap cukup pula oleh orang lain. Kebutuhan merupakan sesuatu yang bersifat relatif tentang apa yang mungkin dan semuanya itu ditentukan oleh definisi yang diakui bersama yang berlandaskan pada pengalaman masa lalu (Sen, 1999). Valentine (1968) mengatakan bahwa esensi kemiskinan adalah ketidaksamaan. Dengan kata lain, makna dasar dari kemiskinan adalah ketidaksamaan atau kesenjangan relatif (Aribowo 2022).

Definisi sosial (relatif) dari kemiskinan memungkinkan terjadinya fleksibilitas dalam memaksa kepedulian lokal, dengan demikian, definisi obyektif kemiskinan yang dilandaskan pada perbandingan dengan wilayah lain, juga banyak digunakan. Definisi paling umum tentang kemiskinan obyektif adalah ukuran-ukuran statistik yang biasanya dilakukan oleh pemerintah, misalnya penghasilan minimal untuk bertahan hidup. Konsep garis kemiskinan pertama kali dikembangkan oleh Mollie Orshansky dari Departemen Pertanian Amerika Serikat tahun 1963. Definisi tentang batas kemiskinan ini sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Ilmu pengetahuan tentang kemiskinan (*science of poverty*), atau yang oleh O'Connor disebut sebagai "knowledge of poverty", sangat dipengaruhi oleh kehidupan politis, atau bahkan ditentukan oleh kebijakan pemerintah.

Kenyataan tentang status kesenjangan serta kepentingan tertentu yang membuat penelitian-penelitian tentang kemiskinan tak dapat terpisahkan dari bias politik. Dalam hal seperti ini, agenda-agenda politik tertentu telah menjadi salah satu faktor penentu definisi tentang kemiskinan disamping pemilihan teori untuk menganalisisnya. Kepentingan politik tertentu yang kuat akan mengatur bagaimana

masalah kemiskinan harus didiskusikan, serta bagaimana masalah tersebut sebaiknya diatasi.

2.2.9.4. Teori Kemiskinan Kontemporer

Literatur terkini tentang kemiskinan menjelaskan berbagai pandangan tentang kemiskinan dari pendekatan teoritik yang berbeda-beda. Pada dasarnya teori tentang kemiskinan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu teori yang menyoroti kemiskinan yang disebabkan oleh kekurangan individual (konservatif) serta teori yang menganalisis akar penyebabnya pada tataran fenomena yang lebih luas (liberal atau progresif). Goldsmith dan Blakely (2010) menggambarkan dikotomi seperti ini pada konsep yang dijelaskan sebagai “kemiskinan sebagai patologi” dan “kemiskinan sebagai suatu struktur”. Jennings (1999) menggambarkan dikotomi kemiskinan ini sebagai “konsepsi individual dan konsepsi kemasyarakatan”.

Kegagalan struktural, ekonomi, politik, maupun sistem sosial merupakan penyebab yang tak kalah pentingnya dalam analisis tentang kemiskinan. Teori-teori tersebut memiliki karakteristiknya sendiri, keunggulannya sendiri, serta, dengan demikian memiliki implikasi yang berbeda pula dalam bentuk intervensi yang harus dilakukan dalam mengatasinya.

Untuk memperjelas kedua kelompok teori tersebut maka perlu dibahas beberapa teori yang dapat menggambarkan dikotomi ini, yaitu :

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan individu

Teori yang pertama ini terdiri dari berbagai macam penjelasan luas yang terfokus pada anggapan bahwa individu sepenuhnya bertanggung jawab atas situasi

kemiskinan yang dihadapinya. Secara khusus, para ahli politik konservatif menyalahkan orang miskin itu sendiri dalam menciptakan masalahnya sendiri. Mereka berargumentasi bahwa hanya dengan kerja keras dan pilihan-pilihan yang sesuai, maka para orang miskin tersebut dapat keluar dari kemiskinannya. Variasi lain dari teori kemiskinan individual ini mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kualitas genetika yang menyebabkan kemiskinan. Intelegensi yang rendah, merupakan salah satu penyebab kemiskinan yang tak mungkin dapat dipungkiri lagi.

Keyakinan bahwa kemiskinan merupakan berasal dari ketidakmampuan individual merupakan suatu pendapat yang sudah sangat tua. Doktrin keagamaan yang meyakini bahwa kekayaan disamakan dengan kebaikan hati Tuhan merupakan gagasan utama dalam reformasi Protestan, dan kecacatan seperti kebutaan, kepincangan, dan berbagai kecacatan lainnya, merupakan hukuman dari Tuhan bagi orang tuanya atau nenek moyangnya. Dengan munculnya konsep tentang intelegensi yang diturunkan nampaknya akan sangat mendasari rasionalisasi atas kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan intelegensi serta keterbatasan fisik lainnya.

2. Kemiskinan yang disebabkan oleh sistem budaya kemiskinan

Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan diciptakan melalui penurunan antar generasi ke generasi berikutnya, terutama yang berkaitan dengan serangkaian keyakinan atau kepercayaan tertentu, nilai-nilai tertentu, serta ketrampilan yang dimiliki oleh individu akan tetapi diturunkan secara sosial. Individu bukanlah pihak

yang harus dipersalahkan, karena dia adalah korban dari budaya atau sub budaya yang mengalami disfungsi.

Budaya merupakan sistem penentu perilaku yang dibentuk, diajarkan, serta dipaksakan secara sosial. Budaya merupakan sistem yang mewujud dan merupakan refleksi dari interaksi sosial. Interaksi sosial yang menurunkan budaya kemiskinan kepada generasi berikutnya inilah yang membedakannya dengan teori kemiskinan individual yang secara eksplisit hanya berkenaan dengan kemampuan dan motivasi individu dalam bekerja.

Secara teknis, budaya kemiskinan ini merupakan sub budaya dari orang miskin dalam sebuah perkampungan miskin, sebuah wilayah miskin, atau dalam konteks sosial dimana para anggotanya saling belajar dan berbagi keyakinan, nilai, maupun norma-norma perilaku tertentu yang terpisah dari budaya induk, akan tetapi menempel dalam budaya utama masyarakat secara luas.

Oscar Lewis (1966) merupakan salah satu ahli utama yang mendefinisikan budaya kemiskinan ini merupakan serangkaian keyakinan dan nilai yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lewis menjelaskan, jika budaya kemiskinan ini sudah muncul dalam sebuah komunitas, maka dia akan memperluas diri dengan sendirinya. Seorang anak yang lahir dalam komunitas miskin, maka dia akan menyerap nilai dan sikap dari sub budaya dimana dia berada, dan akan dijadikan sebagai budayanya sendiri. Jika dia besar dan akan berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, maka dia akan memperkuat sub budaya tersebut dan seterusnya akan membagikannya kepada anak keturunannya. Begitu seterusnya,

dari satu anak ke anak yang lainnya, dari satu keluarga kepada keluarga lainnya, dan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Teori budaya kemiskinan menjelaskan bagaimana program anti kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin dengan memasukkannya dalam sistem kebijakan kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial inilah yang akan mengendalikan seluruh upaya atau program pemberantasan kemiskinan.

3. Kemiskinan yang disebabkan oleh distorsi sistem ekonomi, sosial, maupun politik, atau diskriminasi

Para ahli teori dalam pendekatan ini tidak melihat individu sebagai sumber kemiskinan, akan tetapi melihat pada sistem sosial, ekonomi, dan politik yang mengakibatkan orang mengalami keterbatasan dalam kesempatan memperoleh sumber daya yang diperlukan bagi pencapaian kesejahteraan maupun penghasilan yang mencukupi. Penelitian maupun teori-teori dalam tradisi ini berupaya mengkaji kemiskinan melalui pandangan yang dikemukakan oleh Rank, Yoon, maupun Hirschl. Mereka menyatakan bahwa para peneliti kemiskinan terlalu memusatkan perhatian pada fenomena “siapa yang kalah dalam permainan ekonomi” daripada memberikan perhatian pada fakta bahwa “permainan ekonomi maupun politik telah merancang siapa yang bakal kalah”.

Para ahli teori sosial abad ke sembilan belas telah menolak teori kemiskinan individual dan menyajikan fakta yang menunjukkan bagaimana sistem ekonomi maupun sosial telah menyingkirkan dan menciptakan situasi yang mengakibatkan kemiskinan. Marx, misalnya, telah menggambarkan dengan gamblang bagaimana

sistem ekonomi kapitalis telah secara sadar dan sengaja menciptakan pengangguran yang besar dengan tujuan untuk membuat upah tetap rendah. Kemudian Durkheim yang juga menggambarkan bahwa aksi personal (bunuh diri/*suicide*) juga didorong oleh sistem sosial.

Banyak literatur tentang kemiskinan menjelaskan bahwa sistem ekonomi yang ada sekarang ini distrukturisasi sedemikian rupa oleh kelompok non miskin yang membuat kelompok miskin tetap berada terpuruk di bawah, tidak peduli bagaimanapun kemampuan yang dimilikinya (Jenicks, 1996). Sebagai contoh struktur gaji minimum yang ada sekarang ini tidak memungkinkan seorang orang tua tunggal untuk menghidupi keluarganya dengan layak..

Masalah yang dihadapi oleh orang miskin yang bekerja adalah masalah struktur gaji mereka yang berhubungan dengan hambatan struktural yang ada yang membatasi kelompok atau keluarga miskin untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya pekerjaan yang ada, terutama pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa ketrampilan khusus.

Kondisi ini dikombinasikan dengan semakin langkanya pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada kelompok miskin. Blank dan Quigley dalam Aribowo (2022) menyebutnya sebagai sistem sosial yang meningkatkan kesulitan bagi kelompok miskin untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Kelangkaan ini jelas sekali dibuat oleh kelompok non miskin, bahkan oleh negara sebagai suatu kesatuan. Dengan demikian dapat dikatakan struktur yang timpang ini sengaja diciptakan oleh dunia ini bagi kesengsaraan orang miskin.

4. Kemiskinan karena kesenjangan geografis

Walaupun teori tentang kemiskinan berdasarkan wilayah geografis ini dibentuk dan dipengaruhi oleh teori lain yang berada di luar lingkaran teori kemiskinan, tetapi pada kenyataannya memang kemiskinan seperti ini banyak ditemui di berbagai tempat tertentu. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang, institusi, serta budaya dalam suatu wilayah geografis tertentu memiliki kekurangan sumber daya yang dimiliki sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya mencapai kesejahteraan.

Shaw (1996) menegaskan bahwa ruang (space) bukanlah latar belakang bagi kapitalisme, melainkan sengaja dibuat dan diciptakan oleh kapitalisme yang memiliki fungsi bagi sistem tersebut agar tetap hidup. Dengan demikian, kemiskinan geografis sebagai ruang yang sengaja diciptakan oleh kapitalisme, yang berfungsi memberikan tenaga kerja bagi bekerjanya mesin kapitalisme.

Kemiskinan yang terjadi merupakan kelanjutan dari kesalahan penyetaraan pembangunan, terutama dalam pembangunan ekonomi. Suatu wilayah menjadi tidak menarik untuk penanaman modal bagi perkembangan industri. Setelah perkembangan industri menjadi maju, maka masyarakat menjadi maju.

5. Kemiskinan Holistik dan Lingkaran Ketergantungan yang Rumit

Teori terakhir ini akan membahas situasi yang paling kompleks dan mencakup semua kondisi yang ada dalam keempat teori sebelumnya, dimana ketidak mampuan individu serta kondisi kemasyarakatan yang saling berbelit menjadi sebuah spiral, baik penyebab masalahnya maupun strategi yang diperlukan untuk mengatasinya. Satu strategi akan mengatasi satu kondisi akan tetapi sekaligus

menutup peluang untuk teratasinya kondisi yang lain, dan dengan demikian akan membentuk suatu komplikasi masalah yang sangat besar.

Bradshaw (2007) mengatakan bahwa kondisi kemiskinan seperti ini hampir tak mungkin diatasi. Lingkaran kemiskinan seperti ini merupakan perpaduan antara situasi individual dengan sumber daya masyarakat yang saling pengaruh mempengaruhi.

Teori kemiskinan ini lahir dari studi yang dilakukan oleh Myrdal (1957) yang mengembangkan teori "*interlocking, circular, dan inter-dependence*" dalam proses akumulasi penyebab. Myrdal menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat berhubungan dengan konsekuensi negatif yang sangat banyak pula. Pembangunan industri serta berbagai pembangunan pada sektor lain akan membawa dampak sampingan yang banyak seperti meningkatnya masalah personal maupun kemasyarakatan yang berkepanjangan. Demikian pula kemiskinan yang juga akan membawa dampak yang berkepanjangan dan berputar terus saling memperkuat. Misalnya pada tingkat masyarakat, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran mengakibatkan terjadinya migrasi ke luar daerah secara besar-besaran, dengan migrasi itu maka bisnis lokal menjadi ambruk, akibatnya terjadi penurunan penerimaan pajak, yang mengakibatkan memburuknya sistem pendidikan dan kesehatan, selanjutnya pemburukan sistem pendidikan mengakibatkan semakin buruknya kualitas kemampuan warga untuk bekerja, yang mengakibatkan pengangguran yang semakin besar, industri tidak dapat bersaing, dan akhirnya roboh, yang semuanya akan semakin meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.

Teori kemiskinan seperti ini menunjukkan bagaimana ketidakberdayaan pada konteks sosial yang kemudian berpengaruh terhadap kemampuan psikologis individu. Berbagai faktor struktural dan politis dalam teori siklus ini saling kuat memperkuat satu sama lain dengan faktor ekonomi yang berkaitan dengan variabel masyarakat, sosial, maupun variabel politik. Hal yang paling menarik dalam teori ini adalah secara eksplisit mengkaitkan antara faktor-faktor ekonomi pada tingkatan individual dengan faktor-faktor struktural yang beroperasi pada tataran geografis. Sebagai teori kemiskinan, teori siklus ini menunjukkan bagaimana multiragam masalah berakumulasi, serta adanya suatu pendapat jika salah satu kaitan dalam siklus tersebut diputuskan, maka siklus tersebut akan berhenti. Permasalahannya, bahwa kaitan yang ada dalam siklus tersebut sangat sulit dihentikan atau diputuskan, karena saling diperkuat oleh berbagai faktor ada dalam sistem siklus tersebut.

Kesimpulan dari teori kemiskinan tersebut menuntut seorang pekerja sosial profesional harus peka terhadap kemiskinan dan apa yang menyebabkan kemiskinan tersebut. Dengan mengetahui akar permasalahan dari kemiskinan, maka rencana intervensi terhadap kasus yang terjadi lebih tepat sasaran dan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Kasus *stunting* ini tidak dapat dipandang sebagai kasus kesehatan biasa saja. *Stunting* memiliki efek jangka panjang yang menyumbang lingkaran kemiskinan bila tidak dicegah. *Stunting* berawal dari kemiskinan dan akan menyebabkan kemiskinan dikemudian harinya.

2.2.10. Tinjauan tentang Komitmen Organisasi

Hilton (2015) menjelaskan komitmen organisasi adalah keyakinan kuat yang dimiliki karyawan dalam menerima tujuan serta nilai-nilai organisasi, bersedia berusaha sebaik mungkin atas nama organisasi serta memiliki keinginan yang kuat untuk tetap berada dalam organisasi tersebut. Sedangkan menurut Robbin & Judge (2008), komitmen organisasi adalah tingkat sampai mana seorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi dapat dikatakan komitmen organisasi adalah suatu perilaku yang dimiliki karyawan yang mencerminkan perilaku memihak kepada perusahaan dalam menerima tujuan-tujuan perusahaan atau nilai-nilai yang dianut perusahaan tersebut (Islamy 2016).

Robbin & Judge (2008) menjelaskan tiga dimensi komitmen organisasional yaitu :

1. Komitmen afektif (*affective commitment*)

Perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.

2. Komitmen normatif (*normative commitment*)

Kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis.

3. Komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*)

Memperhitungkan nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan merasa bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarganya.

2.2.11. Tinjauan tentang Positive Reinforcement

2.2.11.1. Pengertian Positive Reinforcement

Beberapa pakar menjelaskan istilah "*positive reinforcement*" seringkali dihubungkan dengan konsep hadiah atau penghargaan. Martin dan Pear dalam Edi Purwanta (2012) menyatakan *positive reinforcement* sering disamakan dengan memberikan hadiah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Muhamad Fahrozin, dkk (2004) mendefinisikan *positive reinforcement* sebagai stimulus yang diberikan setelah perilaku tertentu, sehingga perilaku tersebut akan semakin diperkuat atau muncul lebih sering. Dalyono (2009) mengartikan *positive reinforcement* sebagai penyajian stimulus yang meningkatkan kemungkinan suatu respons. Soetarlinah Sukadji dalam Edi Purwanta (2012) juga menyatakan bahwa apabila stimulus berupa benda atau peristiwa dihadirkan secara berulang-ulang sebagai akibat atau konsekuensi dari suatu perilaku mengakibatkan perilaku tersebut meningkat atau terjaga, maka peristiwa tersebut dapat disebut sebagai *positive reinforcement*.

Pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *positive reinforcement* adalah stimulus atau rangsangan, seperti benda atau peristiwa, yang diberikan setelah perilaku tertentu untuk meningkatkan frekuensi munculnya perilaku tersebut.

2.2.11.2. Model Penerapan Positive Reinforcement

Syaiful Bahri Djamarah (2005) mengemukakan empat model penerapan *positive reinforcement* atau penguatan positif sebagai berikut.

1. Penguatan untuk Seluruh Kelompok

Pemberian penguatan kepada seluruh anggota kelompok dalam kelas dapat dilakukan secara berkesinambungan, sama seperti pemberian penguatan pada

individu. Penguatan dalam bentuk gestur, ucapan, tanda, dan kegiatan dapat diberikan kepada semua anggota kelompok.

2. Penguatan yang Ditunda

Penundaan pemberian penguatan dianggap kurang efektif, namun strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan isyarat verbal bahwa penghargaan akan diberikan kemudian setelah perilaku yang diinginkan ditampilkan.

3. Penguatan Sebagian

Penguatan sebagian sering disebut juga sebagai penguatan tidak kontinu, diberikan kepada siswa sebagai respons atas sebagian dari tindakan mereka.

4. Penguatan Perorangan

Penguatan perorangan merupakan pemberian penguatan secara khusus. Penguatan perorangan dapat dilakukan dengan menyebutkan nama, perilaku, atau pencapaian siswa yang bersangkutan.

Positive reinforcement dapat diberikan oleh melalui berbagai macam model, diantaranya penguatan seluruh kelompok, penguatan yang ditunda, penguatan sebagian, dan penguatan perorangan. Pemberian penguatan kepada seluruh kelompok di dalam kelas dapat dilakukan secara terus menerus. Apabila pemberian penguatan dinilai kurang efektif untuk tingkah laku siswa pada saat itu, maka dapat dilakukan penundaan dengan memberikan isyarat verbal bahwa penghargaan akan diberikan kemudian hari.

2.2.11.3. Implementasi Positive Reinforcement

Edi Purwanta (2012) mengemukakan beberapa pertimbangan dalam penerapan *positive reinforcement* yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan Penguatan (*Reinforcement*)

Penyajian penguatan seketika setelah tindakan atau perilaku berlangsung, lebih efektif daripada penyajian tertunda. Alasannya adalah perilaku tersebut belum diselipi perilaku lain pada saat mendapatkan penguat. Akibatnya efek penguat akan lebih jelas dan tidak terbagi dengan perilaku lain.

2. Memilih Penguat yang Tepat

Tidak semua imbalan dapat menjadi penguat positif (*positive reinforcement*). Untuk menemukan penguat yang efektif bagi subyek-subyek tertentu, pencarian harus dimulai dari penguat yang paling wajar bagi subyek dan situasinya, dan bila belum ditemukan, baru lambat laun berpindah ke penguat yang artificial. Penguat yang berbentuk ucapan (terima kasih, penghargaan, atau pujian) wajar diberikan dalam berbagai situasi. Tetapi penguat ini tidak selalu efektif pada setiap situasi dan setiap orang. Ada berbagai alternatif pilihan yang dapat dijadikan penguat, yaitu makanan, benda-benda konkret, benda yang dapat ditukar sebagai penguat, aktivitas, dan tindakan bersifat sosial.

3. Mengatur Kondisi Situasional

Situasi saat penguat diberikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penguatan tersebut. Pemilihan situasi yang tepat mempunyai dampak positif terhadap terbentuknya dan meningkatnya perilaku yang diharapkan. Tidak semua perilaku perlu diulang setiap waktu. Banyak perilaku yang telah dibentuk, dipelihara, atau ditingkatkan hanya cocok dilaksanakan pada kondisi situasional (waktu, keadaan, dan tempat) tertentu.

4. Menentukan Kuantitas

Kuantitas penguat ialah banyaknya penguat yang akan diberikan setiap kali perilaku yang dikuatkan muncul. Keputusan tentang kuantitas penguat tergantung pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain macam penguat, keadaan deprivasinya, dan pertimbangan usaha yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu penguatan.

5. Memilih Kualitas atau Kebaruan Penguat

Kebanyakan orang akan memilih sesuatu yang baru dan berkualitas tinggi. Sesuatu yang baru cenderung menghilangkan kebosanan atau kejenuhan, sehingga dapat menjadi penguat yang kuat. Sebaliknya sesuatu yang baru dapat juga menimbulkan keragu-raguan atau ketakutan sehingga tidak efektif sebagai penguat.

6. Memberikan Contoh

Penguat yang baru atau yang belum dikenal, dapat tidak efektif karena dapat menimbulkan keragu-raguan atau ketakutan. Karena itu kadang-kadang perlu diperkenalkan dulu dengan memberikan contoh (diberikan kesempatan untuk mencicipi). Bila subjek telah merasakan nikmatnya penguat, stimulus itu dapat mulai dicobakan sebagai penguat.

7. Menangani Persaingan Asosiasi

Banyak penguat maupun hukuman menimpa perilaku-perilaku seseorang, yang berupa reaksi-reaksi dari lingkungan maupun diri sendiri terhadap perilaku. Beberapa reaksi lebih kuat daripada reaksi lain, beberapa saling bersaing sehingga menimbulkan konflik. Pada umumnya reaksi-reaksi yang memberikan

dukungan pada terpenuhinya kebutuhan hidup (pangan, sandang, dan papan) lebih kuat daripada yang memberi pengaruh lain.

8. Mengatur Jadwal Penguatan

Jadwal pemberian penguat ialah aturan yang dianut pemberi penguat dalam menentukan diantara sekian kali suatu perilaku timbul, kapan atau yang mana yang akan mendapat penguat. Macam-macam jadwal penguatan adalah jadwal penguatan terus menerus (*Continous Reinforcement Schedule* atau CRS) ialah penguatan yang diberikan terus menerus setiap perilaku sasaran timbul, dan jadwal penguatan berselang atau jadwal penguatan sebagian (*Intermittent Reinforcement Schedule* atau IRS) ialah penguatan yang diberikan tidak terus menerus setiap kali perilaku sasaran timbul. Jadi hanya sebagian saja yang mendapat penguat.

9. Menangani Efek Kontrol Kontra

Kontrol kontra ialah kontrol atau pengaruh yang sadar atau tidak sadar dilakukakan oleh subyek terhadap orang yang memberi penguatan. Kontrol kontra akan menurunkan efektifitas penguat, karena akan mendorong rasa iba atau belas kasihan yang pada akhirnya penguat kurang bekerja dengan baik.

Positive reinforcement dapat efektif diterapkan jika memperhatikan hal-hal seperti memberikan penguatan segera setelah perilaku terjadi tanpa menunda, memilih penguat yang sesuai dengan perilaku, memilih waktu yang tepat, menentukan jumlah penguat yang sesuai, memilih penguat yang baik, dan mengatur jadwal pemberian penguatan secara baik. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut saat memberikan penguatan kepada target, hasilnya akan lebih efektif.

2.2.12. Tinjauan tentang Teori Motivasi

Robbins dan Judge (2015) menyatakan motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Menurut Hasibuan (2014) menyatakan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintergrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Menurut Uno (2010) menyatakan motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan tingkah laku.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga dapat mencapai tujuannya. Kesimpulan dari tujuan motivasi di atas adalah membuat karyawan bersemangat melakukan pekerjaannya, menjadi karyawan yang aktif, produktif dan kreatif untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.

Menurut Hasibuan (2014) metode-metode motivasi ada dua, yaitu :

1. Metode langsung (*direct motivation*)

Motivasi (material dan non-material) yang diberikan secara langsung kepada individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Misalnya piagam, memberikan pujian.

2. Metode tidak langsung (*indirect motivation*)

Motivasi yang diberikan yaitu merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja/kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah

dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya kursi yang empuk.
Perusahaan

Frederick Herzberg dalam Hasibuan (2014), mengemukakan *Herzberg's two factors motivation theory* atau teori motivasi dua faktor atau teori motivasi kesehatan atau faktor higienis. Menurut teori ini motivasi yang ideal yang dapat merangsang usaha adalah peluang untuk mengembangkan kemampuan. Herzberg menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu:

1. Faktor Higienis (*Hygiene Factor/Maintenance Factors*)

Maintenance factor adalah faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini menurut Herzberg merupakan kebutuhan yang berlangsung terus-menerus, karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi.

Faktor pemeliharaan ini meliputi hal-hal :

- 1) Gaji (*salaries*)
- 2) Kondisi kerja (*work condition*)
- 3) Kebijakan dan administrasi perusahaan (*company policy and administration*)
- 4) Hubungan antar pribadi
- 5) Kualitas supervisi (*quality supervisor*)

Hilangnya faktor pemeliharaan dapat menyebabkan timbulnya ketidakpuasan (*dissatisfiers* = faktor higienis/*hygiene factor*) dan tingkat absensi serta *turnover* karyawan akan meningkat. Faktor-faktor pemeliharaan perlu mendapatkan

perhatian yang wajar dari pimpinan, agar kepuasan dan kegairahan bekerja bawahan dapat ditingkatkan.

2. Faktor Motivasi (Motivation factors)

Motivation factors adalah menyangkut kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini meliputi serangkaian kondisi intrinsik, Kepuasan pekerjaan (job content) yang apabila terdapat dalam pekerjaan akan menggerakkan tingkat motivasi yang kuat, yang dapat menghasilkan prestasi pekerjaan yang baik. Faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan. Faktor ini dinamakan *satisfiers*, yang meliputi :

- 1) Prestasi (*achievement*)
- 2) Pengakuan (*recognition*)
- 3) Pekerjaan itu sendiri (*the work itself*)
- 4) Tanggung jawab (*responsibility*)
- 5) Pengembangan potensi individu (*advancement*)

2.2.13. Tinjauan tentang Kinerja, Rewards and Punishment

Rewards and punishment merupakan dua strategi yang umum digunakan untuk mempengaruhi dan mengontrol perilaku individu dan kelompok. Salah satu aspek yang terkait erat dengan penerapan *rewards dan punishment* adalah kinerja manusia. Dalam berbagai konteks, seperti pendidikan dan pekerjaan, *rewards dan punishment* digunakan sebagai alat untuk mengontrol kinerja individu.

Menurut Iqbal et al. (2011) Penilaian Kinerja atau Performance Appraisal (PA) adalah sebuah sistem yang formal digunakan dalam beberapa periode waktu tertentu untuk menilai prestasi kerja seorang karyawan. Dengan adanya penilaian

kinerja, pegawai akan merasa diharga dan kontribusinya diakui. Dengan demikian mereka akan terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Menurut Saryadi dan Nurseto (2017) dikutip oleh Bilgah (2018) Penilaian Kinerja (*Performance Appraisal*) merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi performa dari pekerjaan yang dilakukan. Hal ini akan memberikan manfaat yang penting bagi karyawan, supervisor, departemen SDM, maupun perusahaan. Di samping itu penilaian kinerja juga dilakukan untuk memotivasi karyawan dengan memberikan dorongan dan salah satunya memberikan komunikasi agar terciptanya kinerja yang maksimal (Pratama and Sukarno 2021).

Rewards memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan atau pegawai. Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi dan hasil kerja yang dicapai, *rewards* memberikan penilaian positif terhadap dedikasi dan kontribusi yang diberikan oleh individu. Tujuan dari pemberian *rewards* adalah untuk memotivasi karyawan agar semakin bersemangat dan berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dengan adanya *rewards*, karyawan akan termotivasi untuk mencapai prestasi atau kinerja yang lebih baik, karena mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan imbalan atau penghargaan yang pantas atas usaha dan kerja keras mereka. *Rewards* menjadi pendorong yang kuat bagi karyawan untuk terus meningkatkan diri, mencapai target-target yang ditetapkan, dan menghasilkan hasil yang lebih baik.

Pratama dan Sukarno (2021) dalam jurnalnya mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil reward memiliki hubungan yang erat dengan kinerja pegawai seperti penelitian yang dilakukan Ruslan et al., (2017)

menyatakan bahwa ada pengaruh variabel reward terhadap kinerja pegawai. Pemberian reward yang sesuai kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang baik sehingga kinerjanya akan semakin meningkat. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Tangkuman, Tewal, dan Trang (2015) bahwa ada hubungan yang signifikan antara penghargaan dan kinerja pegawai. Kemudian penelitian dari Kuncoro dan Susilo (2017) menyatakan bahwa secara simultan reward memberikan kontribusi signifikan pada kinerja karyawan sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan.

Jenis-jenis rewards Menurut Ivancevich (2000) *rewards* dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori luas, yaitu reward intrinsik dan reward ekstrinsik. Keduanya memiliki tujuan yang sama bagi perusahaan (Sahara 2020).

1. Reward Intrinsik

Reward intrinsik didefinisikan sebagai penghargaan yang diatur sendiri atau penghargaan yang berasal dari dalam diri sendiri. Penghargaan ini biasanya berupa rasa puas atau terimakasih, dan terkadang juga berupa perasaan bangga terhadap sebuah pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik.

2. Reward Ekstrinsik

Jenis reward ini merupakan reward yang datang dari luar seseorang atau yang diberikan oleh orang lain terhadap seseorang. Hal ini dapat berupa gaji, tunjangan karyawan, promosi, dan lain-lain.

Punishment menurut kamus umum bahasa Indonesia secara bahasa (harfiah) adalah siksa, dan sebagainya yang didekatkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Punishment merupakan tindakan menyajikan

konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai hasil dari dilakukannya perilaku tertentu (Ivancevich Konopaske, Matteson dalam Gania). Punishment dapat diberikan oleh manajer atau atasan berupa kritikan, penurunan jabatan hingga pemutusan hubungan kerja (Sahara 2020).

Beberapa penelitian mengenai punishment menunjukkan ada pengaruh positif antara pemberian punishment dengan kinerja karyawan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suryadilaga, Musadieg dan Nurtjahjono (2016) menyatakan bahwa punishment berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan artinya semakin tinggi tingkat pemberian punishment karyawan pada PT Telkom Indonesia Witel Jatim Selatan Malang mengakibatkan kinerja karyawan semakin meningkat. Penelitian Dymastara and Onsardi (2020) menunjukkan bahwa variabel punishment memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai di PT. Sandabi Indah Lestari Bengkulu Utara. Penelitian Koencoro, Musadieg dan Susilo (2016) menyatakan bahwa secara simultan reward memberikan kontribusi signifikan pada kinerja karyawan sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan (Pratama and Sukarno 2021).

Adapun jenis-jenis punishment yang dirangkum oleh Sahara (2021) adalah :

1. Punishment Preventif

Punishment preventif yaitu punishment yang dilakukan dengan maksud tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Punishment ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum terjadi pelanggaran.

2. Punishment Represif

Merupakan jenis punishment yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang diperbuat. Jadi jenis hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.

2.2.14. Tinjauan tentang Konsep Pentahelix

Perspektif ini berasal dari perspektif yang diterbitkan pada pertengahan tahun 1990 dengan nama yang sebelumnya yaitu triplehelix merupakan konsep elaborasi dengan melibatkan hubungan tiga pemangku kepentingan yaitu universitas, industri, dan pemerintah. Komunikasi dan negosiasi antar mitra kelembagaan yang tumpang tindih mengakibatkan penataan ulang peraturan yang mendasari hubungan tersebut (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Semakin lama kebutuhan untuk mengembangkan di bidang bisnis semakin kompleks dan semakin kompetitif. Maka kemudian lahirlah penerapan model quadruplehelix dalam mengembangkan dengan menambahkan komunitas sebagai pemangku kepentingan lain yang bergabung dalam konsep ini. Berkaitan dengan hal tersebut maka model kemitraan pentahelix merupakan model penyempurna dari model-model sebelumnya. Model kemitraan pentahelix dapat diartikan sebagai model dengan kerangka konseptual tentang serangkaian bentuk kegiatan yang melibatkan 5 unsur stakeholder pada kegiatan pelatihan yang membentuk satu ikatan kerjasama yang saling bersinergi dan berkolaborasi. Model pentahelix merupakan inovasi dalam bentuk kolaborasi pihak yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Pada hakekatnya model kemitraan pentahelix dapat diartikan juga sebagai sebuah visualisasi atau kerangka struktur yang dijadikan pedoman dalam melakukan kemitraan. Model kemitraan pentahelix juga dapat didefinisikan sebagai

bentuk representasi dari suatu ide inovasi dalam bentuk kerjasama dari suatu kondisi. Model kemitraan pentahelix berisi kegiatan kerjasama yang didalamnya terdapat step-step dan peran pihak mitra yang terlibat yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil lebih baik dari sebelumnya serta dapat menyelesaikan masalah sehingga menjadi fokus dan dapat di selesaikan dengan menggunakan model kemitraan pentahelix tersebut.

Konsep Pentahelix Model didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan : Pemerintah, Bisnis, masyarakat, akademisi dan Media. Modelnya sangat berguna untuk area masalah multipihak dimana pemangku kepentingan mewakili berbagai pihak bersangkutan pada suatu masalah (Prabowo, 2018). Pentahelix adalah perpanjangan strategi triplehelix dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat atau lembaga nirlaba untuk mewujudkan inovasi.

Pentahelix telah diterapkan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Model ini telah terbukti dapat menghasilkan inovasi yang lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berikut adalah penjelasan singkat tentang lima elemen pemangku kepentingan dalam pentahelix :

1. Pemerintah (*Government*) – *Government as Regulator*

Pemerintah berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi, seperti menyediakan infrastruktur, insentif, dan regulasi.

2. Masyarakat (*Community*) – *Community as Accelerator (user and target program)*

Masyarakat berperan dalam memberikan masukan dan dukungan untuk inovasi, seperti berpartisipasi dalam penelitian, pengembangan, dan uji coba produk atau layanan baru.

3. Bisnis (*Bussiness*) – *Business as Enabler*

Peran Business dalam konteks ini diwakili mitra kerja perusahaan yang biasa memberikan sponsor dalam kegiatan pelatihan baik berupa dana, maupun jasa. Dengan peran tersebut akan adanya penyediaan material yang akan mendukung pelaksanaan ketercapaian yang direncanakan. Bisnis juga berperan dalam mengembangkan dan memasarkan produk atau layanan baru, serta menciptakan lapangan kerja.

4. Akademisi (*Academician*) – *Academician as Conceptor*

Akademisi berperan dalam melakukan penelitian dan pengembangan, serta menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan

5. Media (*Media*) – *Media as Expenders*

Media berperan dalam mengkomunikasikan informasi tentang inovasi kepada masyarakat luas, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam inovasi. Media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat *brand image*.

Dengan melibatkan lima aktor utama yaitu pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media, konsep ini menciptakan sinergi dan kerjasama yang memungkinkan pengembangan solusi yang lebih holistik, berkelanjutan, dan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi di dalam Pentahelix berarti penggabungan berbagai perspektif, pengetahuan, dan sumber daya yang dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan secara luas.

2.2.15. Tinjauan tentang Sustainable Development Goals (SDGs) – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Milenium Development Goals (MDGs) atau di Indonesia lebih dikenal dengan Tujuan Pembangunan Milenium sebagai kerangka kerja global untuk mengatasi beberapa tantangan utama dunia, seperti kemiskinan ekstrim, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan lingkungan. MDGs berhasil mengarahkan perhatian dunia pada upaya mengatasi isu-isu tersebut. MDGs dianggap berhasil mengurangi penduduk miskin di dunia hampir setengahnya. Seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa pendekatan tersebut perlu diperbarui dan diperluas untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Dalam rangka mengatasi isu yang lebih luas dan kompleks, PBB meluncurkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2015 di markas PBB, New York, Amerika Serikat. SDGs memperluas kerangka MDGs dengan merangkul berbagai dimensi pembangunan, termasuk isu-isu lingkungan, ketidaksetaraan, perdamaian, dan keadilan. SDGs menekankan pentingnya integrasi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dokumen SDGs pun dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-

capaian MDGs sebelumnya agar langgeng dan berlanjut seterusnya (Ishartono et al, 2016).

SDGs dapat diartikan sebagai sebuah pondasi ataupun kerangka kerja yang berlaku selama 15 tahun. Berlakunya SDGs dimulai pada tahun 2015 dan akan berakhir pada tahun 2030. Pada konsep yang diterapkan oleh SDGs berbeda dengan pendahulunya yaitu MDGs. Konsep SDGs lebih melibatkan banyak pihak baik organisasi sipil maupun organisasi lain. Konsep dalam SDGs sangat diperlukan guna membentuk kerangka pembangunan yang dapat mengakomodasi segala perubahan pada ditetapkannya era MDGs terutama terfokus mengenai perubahan situasi dunia sejak era 2000an (Wahyuningsih, 2017).

Tujuan SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13)

Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (United Nation, 2015). Berikut icon dari 17 SDGs :



Gambar 2. 1 17 Tujuan Utama SDGs

Sumber : *United Nation, Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*

Dari 17 SDGs yang tercantum di atas pada program pencegahan stunting oleh YUM terdapat 3 tujuan yang erat hubungannya yaitu Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan. Hubungan ketiga variabel ini bisa menjurus kepada *vicious cycle*. Ada banyak bukti empiris yang mengindikasikan hubungan timbal balik di antara ketiga variabel tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui variabel antara) seperti contoh berikut: orang miskin cenderung sulit meraih pendidikan yang cukup; karena pendidikan rendah sulit memperoleh pekerjaan

dengan hasil yang cukup; karena penghasilan kecil tidak bisa menyediakan pangan bergizi dan kalau sakit tidak mampu memperoleh pengobatan yang berkualitas; karena sering sakit sering bolos sekolah, bahkan bisa berujung putus sekolah (Bariyah 2022).

Untuk mengukur kemajuan pencapaian SDGs, dibutuhkan indikator yang konkret dan terukur. Setiap tujuan memiliki sejumlah indikator yang memungkinkan pelacakan perkembangan dan pencapaian. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek, termasuk data statistik, informasi kualitatif, dan metrik lingkungan. Dengan indikator-indikator ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan-tujuan SDGs.